



PEMERINTAH PROVINSI BALI



RENCANA KERJA TAHUN 2026



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BALI

Jl. DI. Panjaitan No.10 Niti Mandala Renon Denpasar



KATA PENGANTAR

Om Swastyastu

Angayubagia dan Puji Syukur kami panjatkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Tahun 2026.

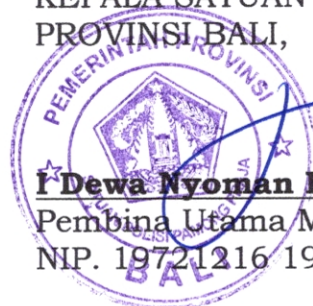
Rencana Kerja merupakan pelaksanaan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah yang disusun berdasarkan atas Rancangan Renja dan masukan-masukan dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat Provinsi Bali.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Tahun 2026 ini, semoga dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2026.

Om Santih Santih Santih Om

Bali, 15 Agustus 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI BALI,



I Dewa Nyoman Rai Dharmadi, SH., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19721216 199803 1 006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar..... i

Daftar isi ii

Bab I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Dasar Hukum 8

1.3 Maksud dan Tujuan 10

1.4 Sistematika Penulisan 11

**Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU 12**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali s/d Tahun 2024..... 12

2.2 Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 21

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah 25

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 26

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 32

Bab III TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN 33

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 33

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 37

3.3 Program dan Kegiatan 38

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 41

Bab V PENUTUP 49

5.1 Kesimpulan 49

5.2 Saran 50



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa dan negara Indonesia yaitu menuju masyarakat sejahtera, adil dan makmur sesuai amanah UUD 45, maka seluruh elemen penyelenggara negara/pengelola pemerintahan wajib melakukan pembangunan secara komprehensif dan berkelanjutan sesuai bidang urusannya masing-masing. Pembangunan merupakan suatu proses yang direncanakan dalam rangka melakukan perubahan kearah yang lebih baik dibanding dengan keadaan sebelumnya sehingga terjadi suatu pertumbuhan dan kemajuan, yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan untuk peningkatan dan pemerataan: Pendapatan masyarakat, Kesempatan kerja, Lapangan usaha, Akses dan kualitas pelayanan publik, serta Daya saing Daerah sesuai pasal 258 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, termasuk pembangunan dalam bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dilakukan untuk menciptakan situasi dan kondisi yang tertib, nyaman dan kondusif.

Mengacu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 12 ayat (1) huruf e dinyatakan bahwa ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah urusan wajib yang bersifat pelayanan dasar, dan pada pasal 255 dinyatakan bahwa dibentuknya Satuan Polisi Pamong Praja adalah untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta perlindungan masyarakat, lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dinyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan urusan wajib yang bersifat pelayanan dasar memberikan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dimana dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja termasuk perangkat daerah yang mengampu salah Jenis Pelayanan Dasar yaitu bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat. Selanjutnya masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pada Pasal 5 dan 6 Bab III, dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 tahun 2023 tentang



Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali yang menyatakan bahwa Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Seiring dinamika perubahan regulasi yang terjadi, evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan di daerah secara paralel terus berproses. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta mengacu pada Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di daerah, telah mempedomani seluruh rangkaian proses sistem perencanaan di daerah. Pasca diterbitkannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 Tentang RPJMN Tahun 2020-2024, diikuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, berimplikasi juga terhadap regulasi dan kebijakan di daerah. Sebagai tindak lanjutnya di Provinsi Bali telah ditetapkan Perda Provinsi Bali No. 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perda No. 10 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Demikian pula halnya dengan telah berlakunya Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD sebagai konsekuensi logis dari pencabutan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 maka penyajian Rencana Kerja Perangkat Daerah wajib mengikuti perubahan sesuai dengan amanah Permendagri Nomor 86 tahun 2017.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah ini mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Pasal 16 ayat (2) yakni melalui beberapa tahapan, yaitu:



A. Persiapan Penyusunan;

Tahapan persiapan penyusunan yaitu:

- 1) Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
- 2) Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
- 3) Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
- 4) Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

B. Penyusunan Rancangan awal;

Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja Perangkat Daerah **paling lambat minggu pertama bulan Desember**. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah, mencakup: analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu. Hasil perumusan rancangan awal Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat :

- 1) Pendahuluan;
- 2) Hasil evaluasi renja perangkat daerah tahun lalu;
- 3) Tujuan dan sasaran perangkat daerah;
- 4) Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah; dan
- 5) Penutup.

Rancangan awal Renja Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang Penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah mencakup: perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD. Rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru diajukan kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda dalam Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.



C. Penyusunan Rancangan

Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf (c) merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah, yang selanjutnya Rancangan Renja Perangkat Daerah dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala Bappeda Provinsi untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan akhir RKPD menjadi rancangan RKPD. Rancangan Renja Perangkat Daerah disampaikan **paling lambat minggu pertama bulan Maret**.

Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan Renja Perangkat Daerah. Verifikasi harus dapat menjamin rancangan Renja Perangkat Daerah sudah selaras dengan rancangan RKPD. Apabila berdasarkan hasil verifikasi, ditemukan hal yang perlu disempurnakan, Bappeda menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah. Berdasarkan saran dan rekomendasi penyempurnaan maka kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda.

D. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;

Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bappeda. Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Pembahasan dengan pemangku kepentingan bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah. Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyempurnaan Rancangan Renja Perangkat Daerah diterima. Hasil pembahasan rancangan Renja Perangkat Daerah dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat



Daerah, dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

E. Perumusan Rancangan Akhir.

Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.

F. Penetapan.

Renja Perangkat Daerah sebagaimana disampaikan Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi. Renja Perangkat Daerah disampaikan **paling lambat 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan**. Verifikasi harus dapat menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja Perangkat Daerah selaras dengan peraturan Kepala Daerah tentang RKPD dan Renja Perangkat Daerah lainnya. Dalam hal hasil verifikasi ditemukan hal yang perlu disempurnakan, Bappeda menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah. Berdasarkan saran dan rekomendasi tersebut, Kepala Perangkat Daerah kemudian menyempurnakan Renja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan tersebut kemudian disampaikan kembali oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda. Verifikasi seluruh Renja Perangkat Daerah, **paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan akhir Renja Perangkat Daerah**. Bappeda menyampaikan seluruh Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. **Penetapan Renja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan**. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.



Rencana Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026 yang merupakan dokumen induk perencanaan pembangunan tahunan dan didalamnya memuat kebijakan pembangunan daerah Tahun Anggaran 2026. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Tahun 2026 merupakan penjabaran dari rencana jangka menengah dan jangka panjang yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan, pengelolaan anggaran belanja, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah pada tahun-tahun yang sebelumnya, antisipasi atas permasalahan yang dihadapi serta mengakomodasikan dan mempertimbangkan berbagai kebijakan nasional dan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Bali serta mempertimbangkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat dan Rancangan Renja yang nantinya disempurnakan pasca penyelenggaraan Forum Gabungan Perangkat Daerah akan menjadi bahan penyusunan dan penyempurnaan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026.

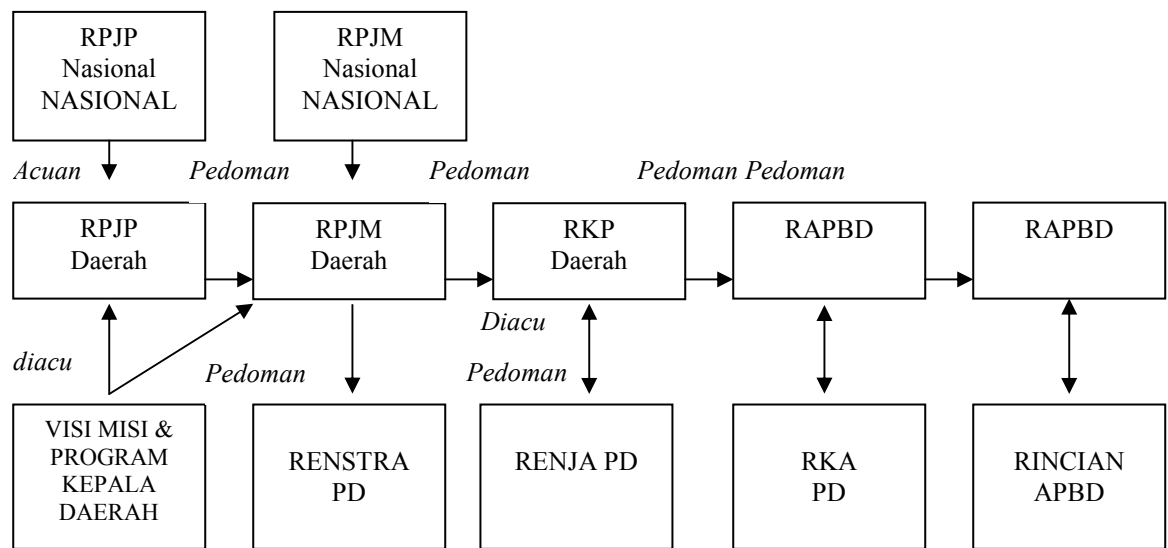
Perencanaan pembangunan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra Perangkat Daerah, memuat kerangka pengelolaan anggaran pendapatan, pengelolaan anggaran belanja, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2026 yang memuat prioritas peningkatan kinerja pemerintahan daerah disusun dengan maksud memberikan landasan dan pedoman bagi semua aparatur daerah dalam memantapkan manajemen pemerintahan daerah Provinsi Bali. Bagi masing-masing bidang dan satuan kerja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali berkewajiban untuk mempedomani Renja serta sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan pendapatan daerah sebagai manifestasi dari pelaksanaan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yaitu mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah. Oleh karena itu program/kegiatan/sub kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Tahun 2026 disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran APBD (KUA-APBD) dan Prioritas



Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Bali Tahun 2026 yang menjadi dasar dalam proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Bali Tahun 2026, khususnya pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali.

Untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah maka berikut disajikan keterkaitan antar dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Lainnya dalam Gambar berikut :

Gambar 1.1.
Hubungan Dokumen Renja Satpol PP Provinsi Bali dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Berdasarkan Gambar 1.1. diatas tampak keterkaitan yang jelas antara RPJMN, RPJPD, RPJMD sampai pada Renstra Perangkat daerah.

Penyusunan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026 mempedomani Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 yang merupakan penjabaran dari Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, serta Renstra masing-masing Kementerian dan Lembaga di Tingkat Pusat. Penyusunan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026 juga disusun dengan menyelaraskan tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan dengan prioritas pembangunan Daerah.



1.2. Dasar Hukum Penyusunan.

- 1.2.1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 1.2.2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 1.2.3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
- 1.2.4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 1.2.5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
- 1.2.6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
- 1.2.7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 1.2.8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
- 1.2.9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
- 1.2.10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana



Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- 1.2.11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 1.2.12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
- 1.2.13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 7);
- 1.2.14. Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 25);
- 1.2.15. Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Satpol PP Provinsi Bali Tahun 2026 adalah :

- a) Sebagai bahan masukan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali Tahun 2026;
- b) Sebagai bahan penyusunan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Provinsi Bali Tahun 2026;
- c) Sebagai pedoman dan gambaran dalam mengimplementasikan tugas pokok serta fungsi Satpol PP Provinsi Bali dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai implementasi visi dan misi Kepala Daerah.



Tujuan penyusunan Rencana Kerja Satpol PP Provinsi Bali Tahun 2026 adalah :

- a) Menentukan prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2026;
- b) Menentukan alokasi sumber daya manusia, sarana prasarana dan anggaran;
- c) Memudahkan dalam penyusunan laporan kinerja bulanan, laporan kinerja triwulan, laporan tahunan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
- d) Memudahkan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam mencapai sasaran.

1.4 . Sistematika Penulisan.

Sistematika penulisan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali dengan susunan sebagai berikut :

Bab. I Pendahuluan :

Bab ini menguraikan Latar belakang yang menjelaskan tentang tugas pokok dan fungsi Satpol PP sesuai peraturan perundang-undangan, Pengertian ringkas tentang Renja Satpol PP, keterkaitan dokumen Renja SKPD dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Lainnya dan dasar hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

Bab. II Hasil Evaluasi Pencapaian Program/Kegiatan Tahun Lalu :

Bab ini menjelaskan tentang :

- 1) Evaluasi Pelaksanaan Renja Satpol PP Provinsi Bali dan Capaian Rencana Strategis sampai tahun 2024;
- 2) Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Satpol PP Provinsi Bali;
- 3) Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi;
- 4) Review terhadap rancangan awal RKPD.



Bab. III Tujuan dan Sasaran :

Pada bab ini diuraikan tentang tujuan, sasaran dan telaahan terhadap kebijakan nasional dan Provinsi Bali.

Bab. IV Rencana Kerja dan Pendanaan :

Pada bab ini diuraikan rencana kerja dan pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2026.

Bab. V Penutup :

Pada Bab ini diuraikan kesimpulan dan Saran.



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu 2024 (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan 2025 (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Tahun Lalu dan Capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Sampai Dengan Tahun 2024.

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali memiliki Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

a) Tugas Pokok

Satpol PP mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan penegakkan peraturan daerah, peraturan gubernur, urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, menyelenggarakan perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan Provinsi, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.



b) Fungsi

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Perundang-undangan daerah serta Perlindungan Masyarakat yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Perundang-undangan daerah serta Perlindungan Masyarakat yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. penyelenggaraan administrasi bidang ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Perundang-undangan daerah serta Perlindungan Masyarakat;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Satpol PP; dan
- e. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

c) Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, terdiri dari Kepala Satuan, Sekretaris, dan empat Kepala Bidang. Lebih lanjut susunannya sebagai berikut :

- 1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
- 2) Sekretaris
 - a. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - b. Bidang Penegakan Hukum, membawahi :
 1. Seksi Pembinaan dan Pengawasan;
 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
 3. Ketua Tim Kerja Sama dan Evaluasi.
 - c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, membawahi :
 1. Seksi Operasi dan Pengendalian;
 2. Seksi Pengamanan dan Pengawalan;
 3. Ketua Tim Intelijen.



- d. Bidang Sumber Daya Aparatur membawahi :
1. Seksi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur/Manusia;
 2. Seksi Teknis Fungsional;
 3. Ketua Tim Data dan Pengembangan.
- e. Bidang Perlindungan Masyarakat membawahi :
1. Seksi Bina Potensi Masyarakat;
 2. Seksi Operasional Linmas;
 3. Ketua Tim Bina Perlindungan Masyarakat.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali tahun 2024, didukung oleh sumber daya manusia (SDM) secara keseluruhan sebanyak 219 orang dengan status :

PNS = 96 Orang
Non PNS = 123 Orang
Jumlah = 219 Orang

Dan berdasarkan kualifikasi sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah PNS Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (orang)
1	S2	14
2	S1	39
3	D3	3
4	SLTA/SMK	40
5	SLTP	-
6	SD	-
JUMLAH		96

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

No	Golongan	Jumlah Orang
1	I	-
2	II	7
3	III	71
4	IV	17
5	IX (PPPK)	1
JUMLAH		96



2.1.2. Realisasi Program/Kegiatan

Tabel 2.3

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan
Perkiraan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja sampai dengan Akhir Tahun Renstra 2024-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar									
1 05	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat									
1.05.01.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	84	83.3	83.63	100%	83.63	83.6	83.6	60%
1.05.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	72 dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	100%	24 Dokumen	24 Dokumen	28 Dokumen	60%
1.05.01.1.01.0001	Sub Kegiatan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	13 dokumen	13 dokumen	100%	13 dokumen	13 dokumen	26 dokumen	60%
1.05.01.1.01.0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	39 dokumen	11 dokumen	11 dokumen	100%	11 dokumen	11 dokumen	22 dokumen	60%



Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja sampai dengan Akhir Tahun Renstra 2024-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.05.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	60%
1.05.01.1.02.0001.	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	330 Orang/Bulan	110 Orang/Bulan	110 Orang/Bulan	100%	110 Orang/Bulan	110 Orang/Bulan	220 Orang/Bulan	60%
1.05.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	6 paket	5 paket	5 paket	100%	5 paket	-	5 Paket	80%
1.05.01.1.05.0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	6 paket	5 paket	5 paket	100%	5 paket	-	5 Paket	80%
1.05.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 jenis	5 jenis	5 jenis	100%	5 jenis	5 jenis	5 jenis	30%
1.05.01.1.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	2 Paket	60%
1.05.01.1.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	9 Paket	9 Paket	100%	9 Paket	9 Paket	18 Paket	100%
1.05.01.1.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	2 Paket	60%
1.05.01.1.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	3 Paket	3 Paket	100%	3 Paket	2 Paket	5 Paket	100%
1.05.01.1.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	4 Laporan	60%



Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja sampai dengan Akhir Tahun Renstra 2024-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.05.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	2 Paket	4 Paket	100%
1.05.01.1.07.0002	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 unit	-	-	-	-	-	-	-
1.05.01.1.07.0005	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	2 paket	3 paket	60%
1.05.01.1.07.0009	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	-	-	-	-	-	-	-
1.05.01.1.07.0010	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	-	1 unit	100%
1.05.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan Jasa Penunjang Urusana Pemerintahan Daerah	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	24 bulan	60%
1.05.01.1.08.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	60%
1.05.01.1.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	4 Laporan	60%
1.05.01.1.08.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	8 Laporan	60%
1.05.01.1.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	9 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	3 Laporan	6 Laporan	60%



Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja sampai dengan Akhir Tahun Renstra 2024-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.05.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	60 bulan	12 bulan	24 bulan	60%
1.05.01.1.09.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas dalam kondisi baik dan siap pakai	141 unit	43 Unit	43 Unit	100%	43 Unit	49 Unit	92 Unit	65%
1.05.01.1.09.0007	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	10 unit	-	-	-	-	5 unit	5 unit	50%
1.05.01.1.09.0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	-	-	-	-	1 unit	1 unit	100%
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	(1) Persentase Pengembangan SDA Pol PP (2) Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi & Non Yustisi (3) Persentase pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) yang ditindaklanjuti	(1) 100% (2) 100% (3) 100%	(1) 100% (2) 100% (3) 100%	(1) 100% (2) 100% (3) 100%	(1) 100% (2) 100% (3) 100%	(1) 100% (2) 100% (3) 100%	(1) 100% (2) 100% (3) 100%	(1) 100% (2) 100% (3) 100%	(1) 60% (2) 60% (3) 60%
1.05.02.1.01	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	510 pelanggaran	190 pelanggaran	288 pelanggaran	100%	288 pelanggaran	170 pelanggaran	458 pelanggaran	90%
1.05.02.1.01.0014	Sub kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	60%



Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja sampai dengan Akhir Tahun Renstra 2024-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.05.02.1.01.0015	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada	6 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	4 Laporan	60%
1.05.02.1.01.0021	Sub kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	108 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	100%	36 Laporan	36 Laporan	72 Laporan	60%
1.05.02.1.01.0022	Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat	Jumlah laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat	150 Orang	131 Orang	131 Orang	100%	131 Orang	192 Orang	323 Orang	100%
1.05.02.1.01.0024	Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	6 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	4 Laporan	60%
1.05.02.1.01.0029	Sub kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman Ketertiban Umum, dan perlindungan masyarakat serta dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	150 Unit	50 Unit	50 Unit	100%	50 Unit	50 Unit	100 Unit	60%
1.05.02.1.01.0030	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100 Orang	-	-	-	-	50 Orang	50 Orang	50%
1.05.02.1.02	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Jumlah kasus pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang ditindaklanjuti secara yustisi dan non yustisi	585 kasus	200 kasus	200 kasus	100%	200 kasus	195 kasus	395 kasus	70%



Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja sampai dengan Akhir Tahun Renstra 2024-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.05.02.1.02.0002	Sub kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah obyek sasaran yang berpotensi melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	2 Laporan	12 Laporan	24 Laporan	60%
1.05.02.1.02.0010	Sub kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	6 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	4 Laporan	60%
1.05.02.1.02.0012	Sub kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Orang/Badan Hukum pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang diproses secara Yustisi dan Non Yustisi	12 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	8 Laporan	60%
1.05.02.1.03	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dibina	4 orang	4 orang	4 orang	100%	4 orang	-	4 orang	100%
1.05.02.1.03.0004	Sub Kegiatan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	60%
1.05.02.1.03.0007	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Karier PPNS dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	-	1 Laporan	100%



2.2 Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Tahun 2024 menyajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategori kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu :

Tabel 2.4
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria penilaian Realisasi kinerja
1	91≤100	Sangat Baik
2	76≤90	Tinggi
3	66≤75	Sedang
4	51≤65	Rendah
5	≤50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali sebagai penyelenggaraan pemerintahan bidang urusan wajib yang bersifat pelayanan dasar dan sekaligus mengampu standar pelayanan minimal (SPM). Pengukuran capaian kinerja terhadap sasaran strategis yang telah ditetapkan yaitu dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, keberhasilan tujuan dan sasaran strategis ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja. Pada Tabel berikut disajikan Capaian Kinerja Masing- Masing Indikator Sasaran Strategis Tahun 2024 :



Tabel 2.5
Target dan Capaian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kreteria	Kode
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat untuk mematuhi Perda/Perkada	Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi & Non Yustisi	%	100	100	100	Sangat Baik	Hijau Tua
2	Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan) yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	Sangat Baik	Hijau Tua
3	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pol PP	Persentase Pengembangan SDA Pol PP	%	100	100	100	Sangat Baik	Hijau Tua
	Rata-rata capaian					100	Sangat Baik	Hijau Tua

Tabel 2.6
Target dan Capaian Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja	2024			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2024 terhadap 2026
	Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6
1.1 Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi & Non Yustisi	100%	100%	100%	100%	30%
2.1. Persentase Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan) yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	30%
3.1 Persentase Pengembangan SDA Pol PP	100%	100%	100%	100%	30%



Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perubahan Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)												(16)
1	Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi & Non Yustisi	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Persentase Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan) yang ditindaklanjuti	-	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	
3	Persentase Pengembangan SDA Pol PP	-	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	75%	100%	100%	

Dari ke 3 (tiga) indikator kinerja sasaran strategis tersebut, seluruhnya dapat mencapai target sehingga capaian kinerja secara rata-rata termasuk dalam kategori **sangat baik** yaitu sebesar 100% dan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi & Non Yustisi telah mencapai target (100%).
- 2) Persentase Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan) yang ditindaklanjuti telah mencapai target (100%).
- 3) Persentase Pengembangan SDA Pol PP tercapai sebesar 100%.

Capaian pelaksanaan penerapan SPM Tahun 2024

Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, melaksanakan pelayanan dasar yang mengacu pada Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

- 1. Jenis Pelayanan Dasar :
Jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan Satuan Polisi Pamong Praja adalah **Pelayanan ketenteraman dan ketertiban Umum**
- 2. Target Pencapaian SPM :
Target dan Indikator Pencapaian SPM Bidang Trantibumlinmas



Provinsi Bali								
No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di provinsi	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan SDM	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum perda dan perkara yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa barang, jasa dan SDM sesuai dengan yang ditetapkan dalam Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di provinsi dan kabupaten/kota

3. Anggaran Alokasi anggaran pemenuhan SPM Sub Urusan Trantibum Tahun 2024 seluruhnya bersumber dari Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024

4. Dukungan Personil Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok Satuan PolisiPamong Praja Provinsi Bali tahun 2024, didukung oleh sumber daya manusia (SDM) secara keseluruhan sebanyak 219 Orang, dengan status :

PNS = 96 Orang

Non PNS = 123 Orang

5. Hasil Capaian

FORM 5.E.4 CAPAIAN TARGET CAPAIAN SPM SUB URUSAN TRAMTIBUM

NO	JENIS LAYANAN DASAR	JUMLAH PENEGAKAN PERDA / PERKADA SESUAI MUTU			PELAYANAN GANTI RUGI			CAPAIAN SPM	KATEGORI
		JUMLAH PELAKSANAAN PENEGAKAN PERDA/PERKADA	JUMLAH PENEGAKAN PERDA /PERKADA YANG SESUAI MUTU LAYANAN DASAR	CAPAIAN (%)	JUMLAH WARGA NEGARA YANG BERHAK MENDAPAT LAYANAN	JUMLAH WARGA NEGARA YANG TERLAYANI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6x100	9	10
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum Provinsi.	200	200	100	0	0	100	100	Tuntas Paripurna

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun penyelenggaraan tugas dan fungsi tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi sehingga akan menimbulkan dampak terhadap pencapaian program dan kegiatan.

2.3.1. Isu Strategis

- a) Perubahan Regulasi yang Dinamis;
- b) Kemajuan Teknologi Informasi;
- c) Bali Sebagai Destinasi Wisata Dunia;

2.3.2. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- a) Adanya perubahan (tarik ulur) kewenangan Pusat dan Daerah;
- b) Masih adanya persaingan tidak sehat di berbagai sektor usaha jasa yang berpotensi mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c) Sensitivitas Trantibumas terhadap kunjungan wisata.

2. Solusi

- a) Melakukan pengawasan, pembinaan dan penindakan terhadap masyarakat/ pelaku usaha yang belum memenuhi ketentuan perizinannya;
- b) Membangun Koordinasi, Kolaborasi & Sinergitas dengan instansi terkait, Kabupaten/Kota, Komponen masyarakat dalam Peningkatan pasitas SDA guna mendukung Kinerja Pol PP;
- c) Mewujudkan pariwisata berkualitas dan Bermartabat;
- d) Satpol PP selalu proaktif, melakukan tindakan antisipasi, penegakan cara yustisi dan non Yustisi kepada pelanggar;
- e) Membangun peran serta partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk patuh terhadap peraturan perundang-undangan daerah.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana kerja Pembangunan Daerah (RKPD) mempunyai kedudukan strategis untuk menghubungkan antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan penganggaran tahunan serta memuat kebijakan publik dan arah kebijakan pembangunan daerah selama 1 tahun dan diharapkan dapat menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen Pemerintah Daerah yang harus dilaksanakan agar menjadi acuan bagi OPD dalam menyempurnakan Renja Perangkat Daerah untuk tahun perencanaan program dan kegiatan yang sama. Adapun langkah-langkah strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah Provinsi Bali dituangkan dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah.

Perbandingan rancangan awal RKPD Tahun 2026 dengan kebutuhan OPD terlihat pada tabel sebagai berikut :



Tabel 2.8
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.05.01	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Denpasar	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	84	35,833,883,686	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Denpasar	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	84	32,553,059,231	
1.05.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Denpasar	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Dokumen	30,000,000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Denpasar	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Dokumen	30,000,000	
1.05.01.1.01.001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Denpasar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 dokumen	20,000,000	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Denpasar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 dokumen	20,000,000	
1.05.01.1.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Denpasar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11 dokumen	10,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Denpasar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11 dokumen	10,000,000	
1.05.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Denpasar	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	30,139,193,222	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Denpasar	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	26,469,342,485	
1.05.01.1.02.001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Denpasar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/Bulan	30,120,045,022	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Denpasar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/Bulan	26,420,794,285	
1.05.01.1.02.003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Denpasar	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	19,148,200	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Denpasar	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	48,548,200	



1.05.01 .1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Denpasar	Jumlah pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	1 Paket	49,716,800	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Denpasar	Jumlah pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	1 Paket	49,453,726	
1.05.01 .1.05.0 002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Denpasar	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	13 Paket	49,716,800	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Denpasar	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	13 Paket	49,453,726	
1.05.01 .1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Denpasar	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Jenis	952,996,890	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Denpasar	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Jenis	598,817,390	
1.05.01 .1.06.0 001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Denpasar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	44,929,900	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Denpasar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	44,929,900	
1.05.01 .1.06.0 002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Denpasar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	634,281,300	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Denpasar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	360,634,700	
1.05.01 .1.06.0 004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Denpasar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	106,013,290	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Denpasar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	106,013,290	
1.05.01 .1.06.0 005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Denpasar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	14,987,400	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Denpasar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	12,737,500	
1.05.01 .1.06.0 009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Denpasar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	152,785,000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Denpasar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	74,502,000	
1.05.01 .1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Denpasar	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	2 Paket	619,878,532	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Denpasar	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	1 Paket	217,604,200	
1.05.01 .1.07.0 005	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Denpasar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	356,886,500	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Denpasar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	217,604,200	
1.05.01.1 .07.0009	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Denpasar	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	262,992,032	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Denpasar	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	
1.05.01 .1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Denpasar	Jumlah bulan penyediaan Jasa Penunjang Urusana Pemerintahan Daerah	12 bulan	730,586,492	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Denpasar	Jumlah bulan penyediaan Jasa Penunjang Urusana Pemerintahan Daerah	12 bulan	2,346,729,680	
1.05.01 .1.08.0 001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Denpasar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2,990,000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Denpasar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2,540,000	
1.05.01 .1.08.0 002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Denpasar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	185,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Denpasar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	185,000,000	



1.05.01 .1.08.0 003	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Denpasar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	110,930,000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Denpasar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	110,930,000	
1.05.01 .1.08.0 004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Denpasar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	3 Laporan	431,666,492	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Denpasar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	5 Laporan	2,048,259,680	
1.05.01 .1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Denpasar	Jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 bulan	3,311,511,750	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Denpasar	Jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 bulan	2,841,111,750	
1.05.01 .1.09.0 001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Denpasar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	48 Unit	2,885,013,500	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Denpasar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	40 Unit	2,714,613,500	
1.05.01 .1.09.0 007	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Denpasar	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	99,998,250	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Denpasar	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	99,998,250	
1.05.01 .1.09.0 009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Denpasar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	326,500,000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Denpasar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	26,500,000	
1.05.02	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9 Kab/Kota se Bali	Persentase Pengembangan SDA Pol PP	100%	28,065,196,446	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9 Kab/Kota se Bali	Persentase Pengembangan SDA Pol PP	100%	25,741,663,215	
			Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi & Non Yustisi	100%				Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi & Non Yustisi	100%		
			Persentase Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) yang ditindaklanjuti	100%				Persentase Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) yang ditindaklanjuti	100%		
1.05.02 .1.01	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	9 Kab/Kota se Bali	Jumlah pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	150 Pelanggaran	26,025,498,252	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	9 Kab/Kota se Bali	Jumlah pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	150 Pelanggaran	24,957,107,910	



1.05.02 .1.01.0 014	Sub kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	9 Kab/Kota se Bali	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	1 Dokumen	349,999,600	Sub kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	9 Kab/Kota se Bali	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	1 Dokumen	218,630,300	
1.05.02 .1.01.0 015	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	9 Kab/Kota se Bali	Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada	2 Laporan	19,979,395	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	9 Kab/Kota se Bali	Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada	2 Laporan	13,184,395	
1.05.02 .1.01.0 021	Sub kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	9 Kab/Kota se Bali	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	4 Laporan	4,371,274,692	Sub kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	9 Kab/Kota se Bali	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	4 Laporan	1,905,053,400	
1.05.02 .1.01.0 022	Sub Kegiatan Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat	9 Kab/Kota se Bali	Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Laporan	110,066,400	Sub kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9 Kab/Kota se Bali	Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Laporan	56,633,100	
1.05.02 .1.01.0 024	Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	Denpasar	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	329 Orang	620,199,092	Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	Denpasar	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	329 Orang	398,959,100	
1.05.02 .1.01.0 029	Sub kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	Denpasar	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	50 Unit	20,503,979,573	Sub kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	Denpasar	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	50 Unit	22,328,231,515	
1.05.02 .1.01.0 030	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Denpasar	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitasnya	50 Orang	49,999,500	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Denpasar	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitasnya	50 Orang	36,416,100	
1.05.02 .1.02	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	9 Kab/Kota se Bali	Jumlah kasus pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang ditindaklanjuti secara yustisi dan non yustisi	190 Kasus	1,812,060,594	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	9 Kab/Kota se Bali	Jumlah kasus pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang ditindaklanjuti secara yustisi dan non yustisi	190 Kasus	667,547,905	



1.05.02 .1.02.0 002	Sub kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	9 Kab/Kota se Bali	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	12 Laporan	1,461,427,988	Sub kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	9 Kab/Kota se Bali	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	12 Laporan	451,874,500	
1.05.02 .1.02.0 010	Sub kegiatan Sosialisasi Ketentuan Sanksi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	9 Kab/Kota se Bali	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	4 Laporan	90,499,700	Sub kegiatan Sosialisasi Ketentuan Sanksi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	9 Kab/Kota se Bali	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	4 Laporan	50,604,700	
1.05.02 .1.02.0 012	Sub kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	9 Kab/Kota se Bali	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sesuai SOP	4 Laporan	260,132,906	Sub kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	9 Kab/Kota se Bali	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sesuai SOP	4 Laporan	165,068,705	
1.05.02 .1.03	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Denpasar	Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dibina	4 Orang	227,637,600	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Denpasar	Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dibina	4 Orang	117,007,400	
1.05.02 .1.03.0 004	Sub Kegiatan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	9 Kab/Kota se Bali	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	4 Dokumen	90,065,900	Sub Kegiatan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	9 Kab/Kota se Bali	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	4 Dokumen	45,874,900	
1.05.02 .1.03.0 007	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Karier PPNS dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum	Denpasar	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	1 Laporan	137,571,700	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Karier PPNS dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum	Denpasar	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	1 Laporan	71,132,500	
1.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	9 Kab/Kota se Bali	Persentase Pengawasan Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	100%	299,999,900	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	9 Kab/Kota se Bali	Persentase Pengawasan Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	100%	228,498,800	
1.05.04. 1.01	Kegiatan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Denpasar	Jumlah Peta Rawan Kebencanaan Kebakaran yang disusun	1 Dokumen	199,999,900	Kegiatan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Denpasar	Jumlah Peta Rawan Kebencanaan Kebakaran yang disusun	1 Dokumen	177,096,900	
1.05.04. 1.01.00 19	Sub Kegiatan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Denpasar	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	1 Dokumen	170,000,000	Sub Kegiatan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Denpasar	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	1 Dokumen	160,983,800	



1.05.04. 1.01.00 22	Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Denpasar	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	1 Dokumen	29,999,900	Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Denpasar	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	1 Dokumen	16,113,100	
1.05.04. 1.02	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	9 Kab/Kota se Bali	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Kota/kab se-bali	1 Dokumen	100,000,000	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	9 Kab/Kota se Bali	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Kota/kab se-bali	1 Dokumen	51,401,900	
1.05.04. 1.02.00 02	Sub Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	9 Kab/Kota se Bali	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	18 Laporan	100,000,000	Sub Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	9 Kab/Kota se Bali	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	18 Laporan	51,401,900	
TOTAL					64,199,080,032					58,523,221,246	



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali pada tanggal 18 Pebruari tahun 2025 telah melaksanakan Forum Perangkat Daerah untuk menerima masukan dari *stakeholder* terkait mengenai program dan kegiatan yang sekiranya dapat dilaksanakan di tahun 2026 sesuai dengan Tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja yaitu menegakkan Perda dan Perkada serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, maka dilaksanakan Forum Perangkat Daerah tersebut dengan maksud dan tujuan yaitu untuk mensinegritaskan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali dengan OPD terkait, Instansi Vertikal, TNI/Polri, dan Satpol PP Kabupaten/Kota se-Bali. Adapun beberapa masukan dan saran untuk Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali untuk Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.9 : Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	9 Kab/Kota	Jumlah kasus pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang ditindaklanjuti secara yustisi dan non yustisi	190 Kasus	
	Sub Kegiatan Sosialisasi Ketentuan Sanksi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah	4 Laporan	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbagai upaya dilaksanakan pemerintah melalui pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan, optimalisasi sumber daya dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Mengacu pada UU. No. 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU. No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang 20 Tahun (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 5 Tahun (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Pendek 1 Tahun (RKPD) yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Dengan berakhirnya periode RPJMD SB Provinsi Bali Tahun 2018-2023, maka untuk menetapkan Tujuan dan sasaran yang akan dituangkan pada Bab III Renja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali mengacu pada RPJMD SB Provinsi Bali Tahun 2025-2029, dan selanjutnya akan diuraikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi;
- 2) Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah; dan
- 3) Program dan Kegiatan.

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka mewujudkan sinkronisasi program dari pusat sampai ke daerah, perencanaan program dan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali disusun dengan berpedoman pada kebijakan Nasional untuk mendukung berjalannya program dan kegiatan agar sesuai dengan yang direncanakan. Begitupula Dokumen RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 terutama menyangkut tujuan dan sasaran pembangunan, prioritas program dan kegiatan, serta kerangka pendanaan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas).

Keterkaitan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026 dan RKP Tahun 2026 juga menyangkut sinergi dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Provinsi Bali dengan Kebijakan Pemerintah Pusat dalam mendukung pelaksanaan agenda pembangunan nasional. Hal ini diwujudkan dengan penyelarasan perumusan Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional. Penyusunan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026 juga memperhatikan arah kebijakan Kementerian dan Lembaga, sehingga menjadi dokumen yang integratif, komprehensif, sinergis, dan konstruktif.

Mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional. Berdasarkan arah kebijakan Nasional Tahun 2026, maka dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali yaitu membantu Gubernur melaksanakan penegakkan peraturan daerah, peraturan gubernur, urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, menyelenggarakan perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan Provinsi, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

Prioritas pembangunan daerah yang telah tersusun akan menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2026. Selain itu prioritas pembangunan daerah dimaksudkan juga untuk menjaga percepatan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional.

Selanjutnya, penentuan prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Bali tahun 2026 juga diarahkan untuk mendukung terwujudnya prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2026. Adapun Prioritas Nasional Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

- 1. Prioritas Nasional 1 :** Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi manusia
- 2. Prioritas Nasional 2 :** Memantapkan Sistem Pertahanan Kemanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.

3. Prioritas Nasional 3 : Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.

4. Prioritas Nasional 4 : Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial, dan Generasi Z) dan Penyandang Disabilitas.

5. Prioritas Nasional 5 : Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.

6. Prioritas Nasional 6 : Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.

7. Prioritas Nasional 7 : Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.

8. Prioritas Nasional 8 : Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam, dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi.

B. Telahaan Terhadap Kebijakan Provinsi

Berdasarkan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu :
Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Bali Era Baru

Serta Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang diampu oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali, yaitu :

Misi 21 : Memperkuat Penyelenggaraan Keamanan Bali Oleh Negara dan Masyarakat Dengan Sistem Keamanan Terpadu.

Dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali mendukung **Tujuan 6 : Terwujudnya Stabilitas Keamanan dan Keharmonisan Sosial di Masyarakat**, serta mendukung mewujudkan **Sasaran : Terjaganya Ketenteraman dan Ketertiban dalam Masyarakat**, dengan **Indikator : Indeks Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat**.

Guna dapat mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kaedah-kaedah atau aturan-aturan yang menjadi rambu-rambu dalam kehidupan dan bermasyarakat perlu dikawal oleh alat negara atau aparat negara yang ditugaskan menurut undang-undang dan atau peraturan dibawahnya seperti Perda/Perkada. Dengan terselenggaranya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat mewujudkan Bali yang Aman, Damai, Tertib, Harmonis sehingga dapat mendorong peningkatan iklim investasi, yang selanjutnya dapat menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran/menanggulangi kemiskinan sehingga akhirnya dapat mencapai tujuan pembangunan yaitu terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

C. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi menjabarkan langkah-langkah sistematis mencapai tujuan dan sasaran melalui program-program prioritas indikatif yang selanjutnya diperjelas dengan kebijakan umum. Untuk mendapatkan gambaran nyata bagaimana langkah-langkah strategi dilakukan dari waktu ke waktu, arah kebijakan membedah kapan indikator capaian masing-masing sasaran harus dicapai. Sekaligus, memandu pada rentang waktu yang mana strategi harus dijalankan dalam kurun waktu periode 2025-2029 tersebut.

Strategi adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Berdasarkan tujuan, dan sasaran yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya, dan sesuai dengan tugas dan fungsi Satpol PP Provinsi Bali yang memiliki tugas pokok : Menegakkan Perda/Perkada, Menyelenggarakan ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, serta

Memberikan Perlindungan Masyarakat, maka strategi yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 disajikan dalam Tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Stabilitas dan Keamanan Masyarakat dan mitigasi	Terwujudnya Ketertiban Umum, Ketentraman, dan Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat	Memperkuat Sistem Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	1. Mewujudkan rasa aman untuk kehidupan masyarakat Bali dan wisatawan di seluruh wilayah Bali 2. Memantapkan pengamanan pada lokasi strategis, Pura Kahyangan Jagat, destinasi pariwisata, Pusat perekonomian, dan Pusat keramaian 3. Memantapkan penyelenggaraan keamanan oleh Negara dan Sipandu Beradat 4. Meningkatkan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung penyelenggaraan keamanan
		Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Menciptakan Keamanan dan Kenyamanan	1. Membangun kesadaran masyarakat bertanggungjawab bersama menjaga keamanan Bali 2. Mengintegrasikan penyelenggaraan keamanan di seluruh wilayah Bali

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Guna mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali yang ditetapkan, Satuan Polisi Pamong Praja yang melaksanakan bidang urusan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat melalui Renstra Perangkat daerah periode 2025-2029 menetapkan 1 (satu) Tujuan dan 4 (empat) Sasaran Strategis yang terdiri dari :

Tujuan : Terwujudnya ketertiban umum, ketentraman, dan penyelenggaraan pelindungan masyarakat

Sasaran :

1. Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada
2. Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan terhadap masyarakat
3. Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
4. Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi SDA/M Pol PP

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 – 2029.

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Per Tahun				
					2026	2027	2028	2029	2030
1	Terwujudnya ketertiban umum, ketenteraman, dan penyelenggaraan perlindungan masyarakat	Indeks ketertiban umum, ketenteraman, dan penyelenggaraan perlindungan masyarakat	1. Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	1. Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	100%	100%	100%	100%
			2. Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan terhadap masyarakat	2. Persentase Penyelenggaraan Trantibumlinmas	100%	100%	100%	100%	100%
			3. Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi SDA/M Pol PP	3. Persentase SDA/M Pol PP yang ditingkatkan Kapasitas dan Kompetensinya	100%	100%	100%	100%	100%
			4. Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	4. Persentase pengawasan Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali.

3.3 Program dan Kegiatan

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali yang dilaksanakan pada tahun 2026 dijabarkan sesuai berikut :

I. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

A. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

1. Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi;
2. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
3. Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan;
4. Sub Kegiatan Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi;

5. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman Ketertiban Umum, dan perlindungan masyarakat serta dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum;
7. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat.

B. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur

1. Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
2. Sub Kegiatan Sosialisasi Ketentuan Sanksi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
3. Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

C. Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi

1. Sub Kegiatan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah;
2. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Karier PPNS dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum.

II. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

A. Kegiatan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran

1. Sub Kegiatan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran;
2. Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran.

B. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

1. Sub Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

III. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

B. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

C. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
5. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

D. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel.
2. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

E. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
4. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

F. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya;
3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Setelah dilaksanakan Forum Perangkat Daerah Rancangan Renja Satpol PP Provinsi Bali Tahun 2026, yang diselenggarakan pada tanggal 18 Pebruari 2025 dengan melibatkan beberapa *Stakeholder* dan instansi terkait, telah ditetapkan Kesepakatan Hasil Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor : B.22.300.1/1891/Set/Satpol PP, tanggal 18 Pebruari 2025, serta sesuai dengan hasil verifikasi anggaran dari tim TAPD, susunan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Renja Satpol PP Provinsi Bali terdiri dari 3 (tiga) Program, 12 (dua belas) Kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) Sub Kegiatan yang telah disertai dengan penerapan efisiensi alokasi anggaran sesuai dengan target kinerja yang ingin dicapai. Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, serta Kebutuhan Dana Indikatif Tahun 2026 dijabarkan pada Tabel 4.1 berikut :



Tabel 4.1
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BALI
TAHUN 2026

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	2026	
			TARGET	ANGGARAN
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	84	32,553,059,231
1.05.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran : Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Dokumen	30,000,000
		Hasil : Persentase Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	
1.05.01.1.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen	20,000,000
1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11 Laporan	10,000,000
1.05.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Keluaran : Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	26,469,342,485
		Hasil : Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	
1.05.01.1.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/Bulan	26,420,794,285
1.05.01.1.02.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	48,548,200



NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	2026	
			TARGET	ANGGARAN
1.05.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Keluaran : Jumlah pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	1 Paket	49,453,726
		Hasil : Persentase Terwujudnya Disiplin Pegawai	100%	
1.05.01.1.05.0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	13 Paket	49,453,726
1.05.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Keluaran : Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Jenis	598,817,390
		Hasil : Persentase Meningkatnya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	
1.05.01.1.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	44,929,900
1.05.01.1.06.0002	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	360,634,700
1.05.01.1.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	106,013,290
1.05.01.1.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	12,737,500
1.05.01.1.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	74,502,000



NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	2026	
			TARGET	ANGGARAN
1.05.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Keluaran : Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	1 Paket	217,604,200
		Hasil : Persentase Terlaksananya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	
1.05.01.1.07.0005	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	217,604,200
1.05.01.1.07.0009	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-
1.05.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran : Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	2,346,729,680
		Hasil : Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	
1.05.01.1.08.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2,540,000
1.05.01.1.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	185,000,000
1.05.01.1.08.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	110,930,000
1.05.01.1.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	2,048,259,680



NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	2026	
			TARGET	ANGGARAN
1.05.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran : Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 bulan	2,841,111,750
		Hasil : Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	
1.05.01.1.09.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	40 Unit	2,714,613,500
1.05.01.1.09.0007	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Keluaran : Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	99,998,250
1.05.01.1.09.0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	26,500,000
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pengembangan SDA Pol PP	100%	25,741,663,215
		Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi & Non Yustisi	100%	
		Persentase Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) yang ditindaklanjuti	100%	
1.05.02.1.01	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Keluaran : Jumlah pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	150 Pelanggaran	24,957,107,910
		Hasil : Persentase penanganan dan penindakan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti dengan baik	100%	



NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	2026	
			TARGET	ANGGARAN
1.05.02.1.01.0014	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	1 Dokumen	218,630,300
1.05.02.1.01.0015	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Keluaran : Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada	2 Laporan	13,184,395
1.05.02.1.01.0021	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Keluaran : Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	4 Laporan	1,905,053,400
1.05.02.1.01.0022	Sub Kegiatan Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Keluaran : Jumlah laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat	12 Laporan	56,633,100
1.05.02.1.01.0024	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	Keluaran : Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	329 Orang	398,959,100
1.05.02.1.01.0029	Sub KegiatanPengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman Ketertiban Umum, dan perlindungan masyarakat serta dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum	Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	50 Unit	22,328,231,515
1.05.02.1.01.0030	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Keluaran : Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	50 Orang	36,416,100



NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	2026	
			TARGET	ANGGARAN
1.05.02.1.02	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Keluaran : Jumlah kasus pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang ditindaklanjuti secara yustisi dan non yustisi	190 Kasus	667,547,905
		Hasil : Persentase pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang ditindaklanjuti secara yustisi dan non yustisi	100%	
1.05.02.1.02.0002	Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	12 Laporan	451,874,500
1.05.02.1.02.0010	Sub Kegiatan Sosialisasi Ketentuan Sanksi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah	4 Laporan	50,604,700
1.05.02.1.02.0012	Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP	4 Laporan	165,068,705
1.05.02.1.03	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Keluaran : Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dibina	4 Orang	117,007,400
		Hasil : Persentase Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang kompeten	100%	
1.05.02.1.03.0004	Sub Kegiatan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	4 Dokumen	45,874,900
1.05.02.1.03.0007	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Karier PPNS dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum	Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	1 Laporan	71,132,500



NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	2026	
			TARGET	ANGGARAN
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pengawasan Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	100%	228,498,800
1.05.04.1.01	Kegiatan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Keluaran : Jumlah Peta Rawan Kebencanaan Kebakaran yang disusun	1 Dokumen	177,096,900
		Hasil : Persentase Meningkatnya Kesadaran Masyarakat dan Aparat Dalam Resiko Kebencanaan Kebakaran	100%	
1.05.04.1.01.0019	Sub Kegiatan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Keluaran : Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	1 Dokumen	160,983,800
1.05.04.1.01.0022	Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Keluaran : Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	1 Dokumen	16,113,100
1.05.04.1.02	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Kota/kab se-bali	1 Dokumen	51,401,900
		Hasil : Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Kota/kab se-bali	100%	
1.05.04.1.02.0002	Sub Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	18 Laporan	51,401,900
Jumlah				58,523,221,246

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Tahun 2026 disusun dan ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dan setiap tahun akan dievaluasi sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja tahun berikutnya, sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja setiap tahunnya.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Tahun 2026 ini tersusun berkat kerja keras dari segenap jajaran aparatur di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja dilakukan secara konsisten sesuai dengan tugas pokok dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali sehingga mampu meningkatkan kinerja dalam proses pembangunan daerah di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta perlindungan masyarakat.

5.1 Kesimpulan

1. Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Tahun 2026 mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029, yaitu :

Misi 21 : Memperkuat Penyelenggaraan Keamanan Bali Oleh Negara dan Masyarakat Dengan Sistem Keamanan Terpadu.

Tujuan 6 : Terwujudnya Stabilitas Keamanan dan Keharmonisan Sosial di Masyarakat

Sasaran : Terjaganya Ketenteraman dan Ketertiban dalam Masyarakat

2. Tahapan proses yang telah dilaksanakan dalam penyusunan Renja Tahun 2026 telah berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Yang salah satunya menerapkan prinsip 3E (Efektif, Efisien, Ekonomis) dengan cara mengevaluasi kembali kegiatan yang kurang efektif atau kurang fokus tidak diusulkan/mengganti dengan kegiatan lain yang lebih fokus.

3. Penyesuaian kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan seluruh kegiatan pada Tahun 2026 telah mengacu pada target kinerja yang ingin dicapai pada masing-masing kegiatan tersebut, namun jika terdapat hal-hal di luar perkiraan yang dapat menyebabkan terjadinya perputaran anggaran di lingkungan OPD, maka sebagai upaya tindak lanjut adalah dengan mengevaluasi dan menyesuaikan kembali target kinerja masing-masing kegiatan (penurunan atau peningkatan target) sesuai dengan kondisi anggaran yang tersedia.

5.2 Saran

1. Melakukan penyesuaian terhadap indikator dan target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan nomenklatur pada Permendagri No. 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023.
2. Melakukan penyesuaian dan evaluasi terhadap kebutuhan anggaran pada Renja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali sesuai dengan kondisi keuangan daerah.
3. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan Satpol PP Kab/Kota dan instansi terkait lainnya dalam pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahunnya.